



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUJIAN KONSEKUENSI

2022

Mahkamah Agung  
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan  
Gambir, Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021) 3843348



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>NOMOR SOP</b>	: 2107/SEK/OT.01.3/9/2022
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 12 September 2022
<b>TGL. REVISI</b>	:
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Sekretaris Mahkamah Agung  (HASBI HASAN)
<b>NAMA SOP</b>	: SOP Pengujian Konsekuensi

**DASAR HUKUM :**

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
3. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memahami tentang SOP Pengujian Konsekuensi
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

**KETERKAITAN :**

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

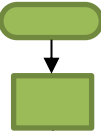






Dokumen informasi yang dikecualikan di setiap bagian  
*Softcopy* Dokumen Klarifikasi Informasi Dikecualikan  
Perangkat keras (*hardware*) : Laptop, Printer, Pulpen, dan Cap Dinas

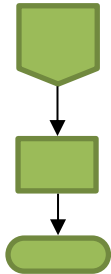
**PERINGATAN :**

Prosedur Pengujian Konsekuensi adalah salah satu tugas dari Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai badan publik. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan pada PPID Mahkamah Agung RI tidak berjalan.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1. Lembar Pengujian Konsekuensi
2. Keputusan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
3. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
4. Keputusan PPID tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Dewan Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi Usulan Informasi Dikecualikan yang ada pada masing-masing PPID Pelaksana					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	1 hari	Draft lembar uji konsekuensi beserta alasan pengecualian	
2	Menyerahkan Hasil Identifikasi Usulan Informasi Dikecualikan yang akan dinyatakan sebagai Informasi Dikecualikan					Memorandum	1 hari	Draft lembar uji konsekuensi beserta alasan pengecualian	
3	Memberikan masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan					Undangan Uji Konsekuensi	2 hari	Draft SK Penetapan Informasi Dikecualikan/ Pengubahan Klasifikasi Informasi Dikecualikan	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Draft Lembar Uji Konsekuensi	1 hari	Draft SK Penetapan Informasi Dikecualikan/ Pengubahan Klasifikasi	

								Informasi Dikecualikan	
5	Menetapkan informasi yang dikecualikan					Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan/ Pengubahan Klasifikasi Informasi Dikecualikan	2 hari	Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan/ Pengubahan Klasifikasi Informasi Dikecualikan	